

Peran Kempetai dalam Proses Perekrutan Jugun Ianfu bagi Tentara Kekaisaran Jepang di Jawa dan Sumatra pada Periode 1942-1945

Suci Eka Ariyani¹, Suparman Arif², Yustina Sri Ekwandari³

^{1,2,3} Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

E-mail: suciekaariyani240198@gmail.com

Abstract – *The outside and is study aims to determine the process of recruiting Jugun Ianfu by Kempetai in the Imperial Japanese Army in Sumatra and Java in 1944-1945. This diploma thesis is based on historical research methods. The author goes through a few steps using the historical research method. First, start with heuristics that collect traces of the past, called historical data. Second, historical materials criticism studies historical materials from the outside and inside. Third, interpretation, the interpretation of historical facts develops into a coherent whole with logical meaning. Fourth: Historiography in the form of historical works. Evaluate, validate and synthesize evidence from collected data to establish facts and draw conclusions. The results show the process of Kempetai's recruitment of Jugun Ianfu in the Imperial Japanese Army in Sumatra and Java in 1942-1945: 1). Following Emperor Hirohito's ideas, it was later embodied in his instructions for the recruitment of Zhu Jun Anfu. 2). The Gunjin Chokuyu doctrine was the basis for all Japanese military activities, including the recruitment of jugun ianfu. 3). The chain of command was ingrained in the Japanese military during Jugun Ianfu's recruitment. 4). Kempetai is responsible for recruiting jugun ianfu in army-controlled areas in Sumatra and Java. 5). Recruitment is done through coercion, fraud, kidnapping and the use of agents/brokers. 6). Japan employs locals to meet the needs of the Japanese army for Jugun Ianfu.*

Keywords: *Kempetai, Jugun Ianfu*

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perekrutan Jugun Ianfu oleh Kempetai untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Sumatra dan Jawa tahun 1942-1945. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Terdapat langkah langkah yang dilalui penulis dengan menggunakan metode penelitian historis. Pertama, di mulai dari Heuristik, yakni menghimpun jejak- jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. Kedua, Kritik Sumber, melakukan kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksternal maupun internal. Ketiga, Interpretasi, penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang dikembangkan menjadi kesatuan yang utuh dan bermakna logis. Keempat, Historiografi, dalam bentuk karya sejarah. Data-data yang dikumpulkan telah di evaluasi, di verivikasi serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa proses perekrutan Jugun Ianfu oleh Kempetai untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Sumatra dan Jawa tahun 1942-1945: 1). Didasari oleh pemikiran Kaisar Hirohito yang kemudian diwujudkan dalam instruksinya untuk merekrut Jugun Ianfu. 2). Doktrin Gunjin Chokuyu merupakan landasan segala aktivitas militer Jepang termasuk dalam perekrutan Jugun Ianfu. 3). Hierarki rantai komando tertanam kuat dalam tubuh militer Jepang dalam proses perekrutan Jugun Ianfu. 4). Kempetai sebagai penanggung jawab dalam perekrutan Jugun Ianfu di daerah pendudukan Angkatan Darat di Sumatra dan Jawa. 5). Perekrutan dilaksanakan melalui cara cara pemaksaan, penipuan, penculikan serta penggunaan agen/broker. 6). Terdapat pribumi yang dimanfaatkan Jepang dalam upaya memenuhi kebutuhan Jugun Ianfu bagi militer Jepang.

Kata Kunci: Kempetai, Jugun Ianfu

 © 2024. JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak bangsa yang pernah mengecap penderitaan dijajah oleh bangsa lain, Bangsa Indonesia dijajah oleh kolonialisme Belanda cukup lama, kemudian dilanjutkan oleh Bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Bangsa Jepang yang menggantikan kolonialisme Belanda tahun 1942 hingga 1945, meninggalkan bekas luka yang menyakitkan hati rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang dikenal sebagai periode penjajahan yang luar biasa kejam, apabila dibandingkan dengan penjajahan Belanda yang berlangsung lebih lama (Nina, 2004: 144). Pendudukan Jepang di Eks Hindia Belanda dimulai

pada saat Jepang berhasil mengusir Belanda dari Hindia Belanda pada Tahun 1942. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Hindia Belanda melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklik Nederlandsch Indische Leger (KNIL) dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk Pontianak, bersamaan dengan serangan ke Jawa (Februari 1942).

Tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Ter Poorten atas nama komandan pasukan Belanda di pihak Sekutu, menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini disebut Kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Hindia Belanda berada di bawah pendudukan tentara Jepang.

Jepang datang ke Hindia Belanda dengan cara propaganda, Bangsa Jepang menggunakan berbagai cara agar dapat menarik simpati masyarakat Hindia Belanda agar siap membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Agar kedatangan Jepang dapat diterima oleh rakyat Hindia Belanda, maka Jepang mempropagandakan akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Jepang juga mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia yang akan membebaskan Bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Bangsa Belanda (Amelia F, 2020:2). Dalam setiap daerah jajahan, pasti terdapat beberapa daerah yang memberontak terhadap daerah jajahan. Dalam mengatasi ini Pemerintah Jepang membentuk Kempetai untuk mengawasi daerah jajahan. Luasnya daerah pendudukan Jepang, menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan, seperti lapangan udara, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan. Pekerjaannya diambil dari desa-desa di Pulau Jawa yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha (Serdadu Pekerja) merupakan nama puitis bagi buruh kasar yang berada di bawah militer Jepang mulai

dilaksanakan sejak 1942- 1945 untuk bekerja di wilayah Indonesia (Nino Oktorino, 2013:55, 101).

Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia maka Jepang membutuhkan pasukan keamanan untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, oleh karena itu di bentuklah pasukan keamanan bernama Kempetai. Kempetai memiliki unit-unit pembantu yang terdiri atas para sukarelawan lokal yang di sebut Kempei-ho maupun unit-unit kepolisian setempat. Mereka terdiri atas orang Indonesia, Tionghoa, Arab, dan beberapa orang Belanda. Selain berkerja sebagai penerjemah, banyak di antaranya yang bertindak sebagai mata-mata. Kempetai juga bertanggung jawab mengatur pelacuran di kawasan yang diduduki Jepang. Tugas ini termasuk mendaftarkan dan memeriksa kesehatan para pelacur, mereka juga memainkan peranan penting dalam merekrut “wanita penghibur” di rumah-rumah bordil Angkatan Darat di seluruh wilayah pendudukan Jepang (Oktorino, 2013: 54-56). Salah satu kewenangan Kempetai adalah mencari dan merekrut wanita penghibur yang di kenal dengan sebutan Jugun Ianfu untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang pada masa pendudukan 1942-1945. Jugun Ianfu adalah sebuah istilah yang berkembang pada masa penjajahan Jepang. Istilah tersebut merujuk kepada mereka yang dinyatakan sebagai korban nafsu seks tentara Jepang selama masa pendudukan di daerah-daerah jajahannya (Hartono & Juliantoro, 1997:87).

Jugun-ianfu juga dapat dikatakan sebagai sebuah situasi yang dikondisikan sebagai tindakan patriotik dan mulia oleh Bangsa Jepang. Perempuan Indonesia diwajibkan untuk ikut mengambil peran dalam Perang Asia Raya. Sumbangan “tubuh” dikondisikan sebagai sebuah pilihan (yang sebenarnya adalah paksaan) (Savitri, 2010:285). Menurut laporan, banyak terjadi tindak kekejaman terhadap wanita-wanita yang malang itu. Sebagai contoh apabila ada wanita-wanita yang menolak memenuhi nafsu tentara Jepang dia akan dihukum dengan cara yang mengerikan. Bahkan wanita penghibur yang diketahui mengidap penyakit kelamin dibakar hidup- hidup. Ketika Jepang menduduki Indonesia mereka juga mengambil wanita-wanita lokal Kalimantan Barat untuk menjadi Jugun

Ianfu (Usman, 2009:41-42). Setelah perang, seorang letnan Jepang memberikan kesaksian mengenai pembunuhan terhadap penduduk setempat sebagai berikut:

"Penduduk pribumi dibunuh dengan cara ditusuk dengan bayonet, tiga tiga orang dalam setiap kesempatan, oleh 21 prajurit Jepang. Setelah eksekusi ini saya mendirikan sebuah rumah bordil dimana saya memaksa gadis setempat menjadi wanita panggilan sebagai hukuman atas tindakan ayah mereka (Oktorino, 2016:258).

Kepala desa dan ketua Tonarigumi sering diwajibkan untuk mengumpulkan wanita dengan jumlah tertentu. Mereka bahkan diberi target perekrutan dan para penduduk tidak berani menolak. Ada juga yang sudah tahu bakal jadi pelacur tetapi mereka tidak berani menentang pihak yang berkuasa, karena Jugun Ianfu harus yang belum bersuami dan usia kawin di masyarakat desa Jawa zaman dulu sangat muda, yang diambil sebagai Jugun Ianfu rata rata masih sangat muda, sekitar 14-15 tahun (Oktorino, 2016:262). Pada masa pendudukan Jepang, para wanita yang telah bekerja sebagai wanita tuna susila atau pada saat itu disebut "Wanita Publik" dibawa dan dikumpulkan, lalu diserahkan ke rumah-rumah prostitusi, hal ini bertujuan untuk memuaskan para tentara Jepang. Selain pelacur Jepang juga mengambil perempuan baik-baik kemudian dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur tentara Jepang. Mereka yang telah terperangkap tipuan Jepang kemudian dipaksa bekerja sebagai wanita tuna susila untuk melayani tentara Jepang. Selain itu ada pula yang dijadikan Jugun Ianfu (Kurniawan, 2017:103).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses Kempetai dalam perekrutan Jugun Ianfu di Indonesia dengan judul "Peran Kempetai dalam proses perekrutan Jugun Ianfu bagi tentara Kekaisaran Jepang di Jawa dan Sumatra pada periode 1942-1945". Isu-isu mengenai Jugun Ianfu perlu diteliti lebih mendalam dikarenakan para Jugun Ianfu dianggap sebagai pelacur yang sengaja menjajakan tubuhnya untuk tentara Jepang, padahal para Jugun Ianfu adalah korban kebiadaban Jepang yang direkrut secara paksa oleh pihak Jepang demi memenuhi

kebutuhan seksual tentara Jepang di daerah jajahannya. Sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita membantu menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Para Jugun Ianfu terpaksa mengorbankan diri mereka di masa penjajahan Jepang untuk hidup yang tidak menentu sampai akhir hayatnya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode historis adalah usaha untuk merekonstruksikan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan (Suryabrata, 1991:16). Langkah-langkah yang digunakan dalam metode historis, antara lain: (1). Heuristik, yaitu kegiatan menghimpin jejak-jejak masa lalu. (2). Kritik sumber (sejarah), yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya. (3). Interpretasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh itu. (4). Historiografi, yakni penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah (Notosusanto, 1984:36). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah (Sjamsuddin, 1996:89). Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah tersebut dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian menjadi fakta sejarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perekrutan Jugun Ianfu Oleh Kempetai Untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Di Eks Hindia Belanda Tahun 1942-1945

Masa di antara Maret 1942-Agustus 1945 merupakan masa di saat Indonesia sangatlah miskin. Masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan kebutuhan pokok, karena semuanya dikuasai oleh pihak Jepang. Orang-orang dipaksa untuk melakukan kerja paksa (romusha) demi kepentingan Jepang. Apabila ada yang pingsan karena tidak kuat bekerja dalam keadaan perut kosong, maka ia akan disadarkan dengan tamparan bertubi-tubi. Pada keadaan sulit tersebut, muncul janji Jepang untuk memberikan pekerjaan yang ternyata hanya alibi, yakni untuk merekrut Jugun Ianfu. Sebagian besar Jugun Ianfu Indonesia berasal dari pulau Jawa. Para perempuan yang direkrut oleh militer Jepang relatif muda, mulai dari usia 12-30 tahun. Terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan utama militer Jepang dalam proses perekrutan:

- 1) Pertama, ekonomi, kebanyakan perempuan Indonesia yang direkrut sebagai Jugun Ianfu berasal dari golongan wong cilik.
- 2) Kedua, perempuan yang secara sosial merupakan perempuan baik, dalam arti perempuan tersebut bukan pekerja seks. Hal ini dimaksudkan agar militer Jepang terjaga “kebersihannya” dan dapat melakukan hubungan seks tanpa rasa takut terjangkit penyakit kelamin.

Militer Jepang memangsa anggota masyarakat yang paling lemah untuk sistem perbudakan seksualnya, mereka yang karena usia, kemiskinan, kelas sosial, status keluarga, pendidikan, nasionalitas atau sukunya rentan ditipu atau diperangkap untuk menjadi budak. Para perempuan umumnya diperoleh dari daerah-daerah yang diduduki dan dikuasai Jepang, dan kebanyakan berasal dari komunitas miskin atau pedesaan. Pada awalnya, militer merekrut perempuan Jepang terutama, namun tidak hanya pekerja seks berlisensi. Namun ketika militer memperluas perang dan masalah serangan pemerkosaan kepada perempuan setempat semakin meningkat, maka

kebutuhan akan perempuan untuk dipekerjakan di “Comfort Station” melonjak sampai jauh melebihi perempuan untuk dipekerjakan di “Comfort Station” melonjak sampai jauh melebihi jumlah perempuan Jepang yang tersedia. Akibatnya, perempuan dari wilayah yang telah diduduki dan dikuasai militer Jepang banyak sekali yang diperjual belikan, dan cukup banyak pula perempuan yang diculik pada saat proses pendudukan daerah baru berlangsung. Sebagian besar “Comfort Women” datang dari keluarga desa yang miskin, yang harus bekerja sejak usia dini untuk membantu nafkah keluarganya. Sejumlah saksi bertestimoni bahwa pada pada perbudakan tersebut, kendati masih kanak-kanak mereka sudah harus bekerja diluar rumah. Terpaksa menghirup hidup yang sulit mereka dapat digolongkan kelompok yang paling terlantar dan sengsara didalam masyarakatnya.

Militer Jepang lebih suka mendapatkan gadis belia yang belum pernah melakukan aktivitas seksual. Sebagai contoh di Borneo, Tokkeitai memaksa perempuan menjalani pemeriksaan medis dan kemudian memilih perempuan yang masih perawan untuk dijadikan “Comfort Women” (Komnas HAM, 2013:108). Di Indonesia, pejabat maupun tentara Jepang mewajibkan banyak keluarga untuk menyerahkan anak perempuan mereka yang berusia di atas 15 tahun. Kebelaaan para perempuan ini terlihat jelas oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. Bukti-bukti menunjukkan tidak adanya pembatasan usia bagi “Comfort Women” yakni diatas 21 tahun, kecuali satu peraturan resmi yang hanya berlaku bagi perempuan Jepang yang mensyaratkan mereka harus “pekerja seks di atas 21 tahun dan bebas dari penyakit menular seksual” (Yoshimi, 1995:100-102).

Pada beberapa kasus, perempuan dijadikan target karena berpartisipasi dalam gerakan perlawanan atau hubungan mereka dengan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota gerakan perlawanan. Di Borneo, perempuan dijadikan target untuk diperbudak karena pernah terlibat dalam hubungan seksual suka sama suka dengan laki-laki Jepang, kendati hubungan seperti itu dilarang dalam aturan militer. Sebagian perempuan lainnya malah dipaksa menjadi budak seks

atas tuduhan palsu atau dicurigai memiliki hubungan seperti itu (Komnas HAM, 2013:109).

1) Instruksi Perekrutan Jugun Ianfu

Dokumen internal yang diterbitkan oleh pemerintah dan militer Jepang pada masa perang memberikan bukti pokok atas tanggung jawab meluas dari pembuatan kebijakan “comfort station” dan pelaksanaannya pada semua aras hierarki pemerintahan. Adalah sebuah dokumen berupa memorandum berjudul “Hal-hal Mengenai Rekrutmen Perempuan” (“Memo Rekrutmen”) yang dikirim pada 4 Maret 1938 oleh seorang Ajudan Jenderal Kementerian Perang kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah (Komnas HAM, 2013:41). Dokumen yang menunjukkan keterlibatan ini mengungkapkan usaha militer untuk menyamakan sifat koersif dari “comfort system”, keikutsertaan otoritas lokal, dan supervisi militer kepada pelaku individual dalam proses rekrutmen. Memo rekrutmen tersebut ditulis secara lengkap di bawah ini:

“Pemberitahuan dari Ajudan kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah Merekrut perempuan lokal untuk bekerja di “comfort station” militer yang akan didirikan di daerah-daerah terdampak Insiden Cina, dikhawatirkan terdapat beberapa orang yang mengklaim bertindak atas persetujuan militer dan telah merusak kehormatan tentara, dan mengundang salah pengertian publik. Kami juga khawatir, bahwa dengan perantaraan wartawan yang mengikuti militer dan orang-orang yang mengunjungi tentara, ada pihak-pihak yang merekrut perempuan tanpa supervise dan menimbulkan problem sosial. Telah ada pula contoh bagaimana orang-orang yang tidak tepat telah ditugasi mengumpulkan perempuan, mereka bahkan menculik perempuan dan ditahan polisi. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius. Kedepan, tentara di lapangan akan mengontrol rekrutmen perempuan dan secara teliti menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan tugas ini. Tugas ini akan dilaksanakan melalui kerja sama erat dengan polisi militer atau satuan polisi lokal. Demikianlah Anda diberitahukan mengenai perintah (dari Kementerian Perang) untuk

menjalankan tugas ini dengan sangat memperhatikan kehormatan militer dan menghindari problem sosial.” (Komnas Ham, 2013:41).

Memo ini secara sepintas tampaknya menunjukkan bahwa Kementerian Perang memiliki hendak mengakhiri praktek penculikan sebagai cara “memperoleh” perempuan untuk “comfort stations”. Bagaimanapun dokumen ini tidak memerintahkan Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah, sebagai penerima dokumen, untuk memastikan persetujuan dari perempuan yang direkrut ke dalam sistem “comfort station”, maupun untuk menghindari “rekrutmen perempuan di bawah umur”. Sebaliknya, dokumen tersebut mendorong mereka untuk “menjalankan tugas ini dengan sangat memperhatikan kehormatan militer dan menghindari problem sosial”. Jadi, Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah diberitahu melalui memo ini bahwa metode “rekrutmen” mencakup penculikan perempuan. Mereka juga diperingatkan melalui memo tersebut untuk berhati-hati agar tidak menciptakan problem sosial melalui praktek rekrutmen yang mereka lakukan, dan bahwa polisi militer dan polisi lokal sebaiknya dilibatkan dalam proses rekrutmen. Karena itu, penerima memo ini tidak hanya diberi tahu bahwa tindak pemaksaan dan langkah koersif dapat dipakai untuk “merekrut” perempuan, tapi juga diperintahkan untuk menjalankan tugasnya di dalam “comfort system” tersebut secara lebih berhati-hati, melalui kerja sama dengan tentara atau polisi lokal.

2) Metode-Metode Perekrutan Jugun Ianfu

Dalam proses rekrutemen perempuan-perempuan yang akan dijadikan Jugun Ianfu, militer Jepang menggunakan tiga metode yang bersifat memaksa, yaitu:

- a) Perekrutan paksa/penculikan (kidnapping through physical and sexual violence).

Militer Jepang kerap melakukan perekrutan paksa, yaitu penculikan yang disertai aksi kekerasan, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan muda di jalan-jalan, di rumah-rumah penduduk, atau tempat perempuan

muda tersebut bekerja (sawah atau di perkebunan).

- b) Pemaksaan disertai ancaman (coercion by frightening the women and family through threats and terror)

Militer Jepang memaksa calon Jugun Ianfu dan keluarganya dengan menyebarkan perasaan takut terhadap berbagai ancaman dan teror secara terus menerus sebagai bentuk kekerasan psikologi. Metode lain mengumpulkan perempuan untuk fasilitas perbudakan seksual adalah wajib militer. Panggilan wajib militer masuk ke dalam sistem perbudakan militer sebagai bagian dari perang. Juga terdapat kasus dimana seorang laki-laki Jepang dan kepala desa setempat memaksa orang tua menandatangani surat persetujuan dengan alasan tidak memiliki anak laki-laki dan berbohong dengan mengatakan bahwa anak perempuannya akan dijadikan anggota "Teishintai" pada pabrik seragam militer. Penipuan wajib militer ini untuk mengurangi perlawanan.

- c) Penipuan (dishonest promises to give them an education and/or job).

Militer Jepang, polisi sipil serta agen-agen mereka memasukkan "Comfort Women" ke dalam sistem perbudakan seksual dengan segala cara. Mulai dari kekerasan atau ancaman kekerasan, juga menipu dan memperdagangkan. Adapun para saksi memastikan bahwa mereka diperbudak setelah diculik, atau dengan cara pemaksaan lainnya, termasuk kewajiban militer, penangkapan, penahanan, intimidasi serta memanfaatkan pemimpin setempat untuk menyerahkan gadis-gadis belia.

3) Penggunaan Pelaku Agen/Broker Dalam Pembelian/Pengumpulan Jugun Ianfu

Sebagaimana tindak kejahatan meluas lainnya, banyak sekali orang dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan perempuan untuk perbudakan seksual. Tentara, polisi militer, polisi sipil, dan pejabat lainnya terlibat penuh dalam penculikan paksa atau rekrutmen menipu. Masyarakatpun dimanfaatkan Jepang untuk mengumpulkan

perempuan. Pada beberapa kasus, pejabat setempat atau tokoh di daerah pendudukan, juga berpartisipasi dalam pengumpulan perempuan. Di Indonesia, sudah umum bahwa kepala desa terlibat dalam perekrutan. Pejabat Jepang mewajibkan para kepala desa memenuhi kuota, maka mereka lalu memaksa para orang tua untuk menyerahkan anak-anak perempuannya. Catatan Harian Operasi Kementerian Perang menyatakan bahwa "para kepala desa ditugasi membangun comfort stations dan mengelolanya sebaik-baiknya. Dalam kasus Mardiyem bersaksi bahwa Wali Kota Banjarmasin Shogenji, terlibat dalam perekrutan dirinya. Militer Jepang, bersama pejabat setempat dan agen sipil, mengumpulkan perempuan belia dan dewasa untuk sistem "comfort" tanpa persetujuan para perempuan tersebut. Artinya, tidak ada "consent" atau kesepakatan pihak perempuan untuk menjadi "comfort woman", terlepas apakah mereka ditipu, dibeli atau ditukar, diwajibkan maupun diperoleh secara paksa. Sama sekali tidak ada andil korban. Prinsip ini juga berlaku untuk perempuan pekerja seks yang juga ditipu pada saat rekrutmen (Komnas HAM, 2013:113-114).

Proses perekrutan Jugun Ianfu melibatkan metode yang tidak sederhana adanya perantara atau pihak ketiga juga terjadi demi memanipulasi orang-orang Indonesia untuk ikut bergabung. Terdapat dua jenis sistem broker/agen yang digunakan militer Jepang sebagai perantara dalam upaya mengumpulkan kandidat perempuan Jugun Ianfu:

- a. Pertama melalui sistem Tonarigumi (RT/RW) sebagai agen perekrutan perempuan-perempuan muda dari desa-desa (Eka Hindra, Koichi Kimura, 2007:230). Broker/agen berasal dari kelompok sipil-rakyat biasa.
- b. Kedua dikenal dengan sebutan Sendenbu (Departemen Propaganda: Barisan Propaganda Jepang) terdiri dari orang-orang pribumi yang memiliki kekuasaan dan wewenang karena menempati posisi sebagai pejabat pemerintah. Departemen ini merupakan bagian integral dari strategi perang Jepang, selama periode 1942-1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah totaliter yang sepenuhnya diatur oleh Jepang, dengan

kendali kekuasaan atas Pangeh Praja (Kalangan Priyayi/ Penguasa Kerajaan/ Bangsawan) dan pejabat-pejabat lokal (Kepala Kabupaten, kepala daerah, kepala desa) berada ditangan Kempeitai.

Dalam beberapa kasus perekrutan Jugun Ianfu, para perempuan yang direkrut juga berasal dari keluarga bangsawan yang kuat dan berpendidikan, semisal anak dari Kepala Kabupaten. Hal itu merupakan konsekuensi yang harus mereka hadapi karena statusnya sebagai pejabat fungsionaris; pejabat yang bekerja sama (baik secara sukarela ataupun dibawah ancaman) dengan militer Jepang demi mempertahankan posisinya. Para fungsionaris yang berada di tingkat regional diwajibkan untuk melakukan tugas khusus seperti membuat propaganda perekrutan terhadap warga yang dipimpinnnya, dan apabila pejabat fungsionaris tidak mampu menyediakan perhiasan yang berharga untuk diberikan kepada Dai Nippon, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikan anak perempuan mereka sebagai gantinya.

4) Model Perekrutan Jugun Ianfu Oleh Agen/Broker

Beberapa upaya yang dilakukan agen perantara baik Tonarigumi ataupun Sendenbu dalam mengumpulkan calon Jugun Ianfu dikategorikan kedalam beberapa model:

a) Mass Searching

Mass Searching secara umum dilakukan di pusat desa atau tempat-tempat tertentu, yang diikuti dengan proses pemeriksaan kesehatan keseluruhan bagi semua calon perempuan yang berhasil dikumpulkan, yang terpilih menjadi Jugun Ianfu harus mereka yang terbukti sehat dan “layak” memiliki wajah cantik, perawan, masih lugu menurut pihak Jepang akan dipekerjakan sebagai Jugun Ianfu yang ditempatkan di Ian-jo-Ian-jo di berbagai daerah.

b) Small Scale Searching

Perempuan yang direkrut dari proses ini pada umumnya ditempatkan di rumah-rumah pribadi dan secara bertahap diambil oleh tentara Jepang ataupun pejabat-pejabat. Perempuan lokal yang terseleksi melalui model ini, selain bertugas

melayani kebutuhan seksual para perwira Jepang, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya seperti menyediakan makanan, mencuci baju di rumah para perwira yang memiliki pangkat tinggi (UI, 2014:17).

B. Proses Perekrutan Jugun Ianfu oleh Kempetai untuk Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Jawa Dan Sumatra tahun 1942-1945

Pemikiran Kaisar Hirohito yang mengetahui bahwa personil militernya mengalami keletihan secara mental akibat perang yang berkepanjangan yang berimbas pada kebutuhan seksual personil tentara yang terpisah jauh oleh pasangannya di daratan Jepang, sehingga sering terjadi peristiwa pemerkosaan. Hal ini berbahaya karena akan berdampak pada kesehatan personil militer Jepang yang harus dipersiapkan secara lahir batin untuk memenangkan Perang Asia Raya.

Pada tahun 1932 atas perintah Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jenderal Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji memerintahkan pembangunan Comfort Station yang bertujuan untuk memulihkan psikologis para personil militernya melalui layanan pemenuhan kebutuhan seksual yang disediakan oleh wanita-wanita di daerah pendudukannya untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual yang dapat mengganggu kondisi fisik personil militernya, hal ini bukanlah sekedar perintah dari atasan melainkan kemauan dari kaisar sendiri. Setelah menduduki Hindia Belanda, pada wilayah pendudukan angkatan darat Jepang di Jawa dan Sumatra dibangunlah Ianjo-Ianjo.

Militer Jepang Juga mendirikan “Comfort Stations” di Indonesia setelah menginvasinya pada 1942. Juga memaksa dengan kekerasan sehingga berhasil menawan perempuan pribumi Indonesia maupun keturunan Belanda baik yang belia maupun dewasa ke dalam fasilitas “comfort”, dan menjadikan mereka budak seks. Seorang dokter militer yang juga kepala biro media Kementerian Perang, Setsuzo Kinbara, sejak tahun 1941 sudah giat menganjurkan agar “Comfort Station” didirikan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pengamatannya bahwa rakyat Indonesia pemeluk Islam yang kuat, serta kebutuhan untuk menumbuhkan rasa percaya rakyat Indonesia. Ia

khawatir rasa percaya itu akan hancur apabila tentara Jepang sampai memperkosa perempuan pribumi. Dr. Kinbara juga menganjurkan agar kepala desa dilibatkan dalam pembangunan “comfort stations”, sehingga lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diantara tentara Jepang dan warga setempat (Komnas HAM, 2013:95).

Banyaknya tempat hiburan yang merangkap sebagai tempat prostitusi yang berdiri di daerah pendudukan melibatkan Kempetai. Kempetai yang merupakan polisi militer dari angkatan darat bertanggung jawab mengatur pelacuran di kawasan yang diduduki Jepang. Tugas ini termasuk mendaftarkan dan memeriksa kesehatan para pelacur. Kempetai juga memainkan peranan penting dalam merekrut wanita penghibur di rumah-rumah bordil Angkatan darat di seluruh wilayah pendudukan Jepang, di Hindia Belanda khususnya di Sumatra dan Jawa.

Kempetai melaksanakan tugas ini berdasarkan titah dari Kaisar Hirohito dan dilandasi oleh doktrin Imperial Rescript Armed Force yang tertanam kuat dalam militer Jepang, ditambah sistem hierarki yang kuat dalam rantai komando militer Jepang dimana kedudukan Kaisar sangatlah tinggi menjadikan perintah kaisar harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua personel militer sebagai wujud kepatuhannya kepada Kaisar karena doktrin inilah yang melandasi segala tindakan personel militer Jepang di medan perang dan doktrin ini merupakan “pembenaran” dari setiap kebijakan yang dibuat oleh Jepang sekalipun merupakan tindakan kejahatan perang. Dengan alasan bahwa Jugun Ianfu akan berdampak positif pada kekuatan militer mereka. Dengan pemuasan segala hasrat prajuritnya maka para prajurit itu akan bisa bertugas semaksimal mungkin maka Jepang menggunakan praktek Jugun Ianfu tersebut. Pembentuk Jugun Ianfu atau wanita penghibur membuktikan bahwa sistem perbudakan seksual militer Jepang adalah bagian standar dan tidak terpisahkan dari perang agresif Jepang di seluruh kawasan Asia Pasifik. Kebijakan dan prosedur pengoperasian sistem ini didirikan di tingkat tertinggi dari pemerintah Jepang.

Perempuan dan anak perempuan di seluruh wilayah koloninya diculik, wajib militer, dipaksa, atau diambil melalui cara-cara menipu dan paksa dijadikan bagian dari sistem perbudakan seksual militer. Setelah diperbudak, para perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran perkosaan dan penyiksaan terus-menerus, kadang-kadang di pemerkosaan, serta kondisi yang tidak manusiawi penahanan. Para wanita diperbudak dan berulang kali diperkosa, banyak perempuan dan anak perempuan yang belum menikah dan kehilangan keperawanan mereka ketika mereka pertama kali diperkosa.

Namun, beberapa kasus membuktikan bahwa wanita yang sudah menikah juga telah direkrut dan diperkosa, diketahui atau tidak diketahui keluarga. Mereka mengalami pemukulan, penusukan, pembakaran dan penyiksaan seksual. Kondisi kasar juga menyebabkan kerugian emosional dan psikologis yang parah. Selama waktu mereka di stasiun kenyamanan, sebagian besar dari mereka mengalami kerugian reproduksi, seperti, kehamilan, aborsi, keguguran, sterilisasi, mutilasi seksual dan penyakit menular seksual. Kondisi memprihatinkan penahanan sering mengakibatkan malnutrisi, penyakit, penyakit dan kematian. Sejumlah besar perempuan dan anak perempuan tidak bertahan hidup dengan kondisi dan perlakuan atau sengaja dibunuh. Hal ini menjadikan bahwa korban Jugun Ianfu ini adalah salah satu korban kebijakan politik yang diberlakukan Jepang sebagai langkah pemaksimalan kualitas tentara Jepang yang akan berperang. Dan jika ditanyakan dengan pertanyaan apakah ini sebuah prostitusi atau kekerasan seksual, Jugun Ianfu ini merupakan gabungan keduanya, atau mungkin lebih tepatnya ini bisa masuk kedalam budak seks.

1) Proses Perekrutan Jugun Ianfu di Sumatra

Pulau Sumatra pada tahun 1942 dikuasai oleh Tentara Ke 25 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan menjadi Wilayah I dengan Jenderal Moritake Tanabe sebagai Panglima Tertinggi Tentara Ke 25 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pulau Sumatra dibagi menjadi 8 wilayah karesidenan (syu), yaitu: Bangka Belitung, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatra Barat

dan Sumatra Timur. Tentara Jepang mengalami krisis menyangkut kehidupan seks mereka ketika mereka menduduki Sumatra. Dalam hal ini, perintah untuk merekrut Jugun Ianfu bukanlah atas instruksi/permintaan langsung dari Panglima Tertinggi Tentara Ke 25 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menduduki Sumatra Jenderal Moritake Tanabe melainkan perekrutan dilakukan terpisah pada setiap daerah pendudukan Jepang di Sumatra tanpa satu instruksi serentak.

Perekrutan di Pulau Sumatra menggunakan metode Mass Searching dan Small Scale Searching, namun terkadang perekrutan Jugun Ianfu dapat dilakukan seketika begitu saja ketika timbul hasrat seks dari Tentara Jepang yang bisa datang kapan saja dan seketika sehingga timbul keinginan untuk mencari Jugun Ianfu. Peneliti meng-analogikan seperti ini, jika tentara Jepang pada daerah pendudukan di Sumatra Barat merekrut Jugun Ianfu, maka daerah pendudukan-pendudukan lain seperti daerah Aceh, Brastagi, Palembang dan Bangka tidak mengetahui bagaimana proses perekrutan di Sumatra Barat mulai dari prosesnya seperti, metode yang digunakan seperti apa dan begitu pula sebaliknya, tetapi setiap daerah pendudukan Jepang di Sumatera satu sama lain sama-sama mengetahui bahwa setiap daerah pendudukan pasti melakukan perekrutan Jugun Ianfu. Tentara Jepang dalam hal ini, yakni merekrut Jugun Ianfu telah mendapatkan Legal Standing yakni berdasarkan perintah langsung dari Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jenderal Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji.

Jepang pada awal praktek penerapan sistem Jugun Ianfu dilakukan dengan cara legal, dengan membawa wanita penghibur dari Jepang atau Korea. Namun seiring berjalannya waktu dan meluasnya wilayah teritori kekuasaan Jepang pada Perang Dunia ke 2, berubah menjadi eksploitasi dan perbudakan dengan cara-cara ilegal karena kebutuhan wanita penghibur sebelumnya yang dibawa dari Jepang atau Korea tidak mampu mencukupi kebutuhan seksual Tentara Jepang yang telah tersebar dimana-mana dalam kasus penelitian ini yakni di Pulau Sumatra. Akhirnya militer Jepang melakukan perekrutan dengan cara lain yakni

dengan kekerasan, paksaan, penipuan dan penculikan yang dilakukan pada perempuan-perempuan sipil di wilayah yang diduduki, termasuk Indonesia khususnya Sumatra.

Terdapat dua tipe Jugun Ianfu yakni Baishi Yunfu (PSK) dan Seiteki Dorei (Budak Seks), untuk tipe Jugun Ianfu yang terdapat di pulau Sumatra yakni tipe Seiteki Dorei (Budak Seks) karena perekrutan dilakukan dengan paksa, kekerasan, penipuan dan penculikan.

Berdasarkan data-data yang peneliti temukan untuk proses perekrutan Jugun Ianfu di Sumatra, rata-rata korban Jugun Ianfu didapatkan melalui cara-cara paksaan dengan metode Mass Searching dan Small Scale Searching, namun untuk kasus di Sumatra Barat yakni Padang, perekrutan dilakukan atas permintaan Kolonel Fujiyama dengan meminta Ir. Soekarno untuk menyediakan perempuan yang akan dijadikan Jugun Ianfu (sistem broker/agen Sendenbu yang menggunakan orang-orang pribumi yang memilik kekuasaan dan Soekarno termasuk dalam itu).

2) Proses Perekrutan Jugun Ianfu di Jawa

Pulau Jawa pada tahun 1942 dikuasai oleh Tentara Ke 16 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan menjadi Wilayah II dengan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tertinggi Tentara Ke 16 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Pulau Jawa dibagi menjadi 17 wilayah karesidenan (syu), yaitu: Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun, Bojonegoro, Surabaya, Kedu, Pati, Semarang, Banyumas, Pekalongan, Cirebon, Priangan, Bogo, Jakarta dan Banten. Tentara Jepang mengalami krisis menyangkut kehidupan seks mereka ketika mereka menduduki Jawa. Dalam hal ini, perintah untuk merekrut Jugun Ianfu bukanlah atas instruksi/permintaan langsung dari Panglima Tertinggi Tentara Ke 16 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menduduki Sumatra yakni Jenderal Hitoshi Imamura melainkan perekrutan dilakukan terpisah serta masing-masing pada setiap daerah pendudukan Jepang di Jawa tanpa satu instruksi serentak.

Perekrutan di Pulau Jawa menggunakan metode Mass Searching dan Small Scale Searching, namun terkadang perekrutan Jugun Ianfu dapat dilakukan

seketika begitu saja ketika timbul hasrat seks dari Tentara Jepang yang bisa datang kapan saja dan seketika sehingga timbul keinginan untuk mencari Jugun Ianfu.

Peneliti meng-analogikan seperti ini, jika tentara Jepang pada daerah pendudukan di Semarang merekrut Jugun Ianfu, maka daerah pendudukan-pendudukan lain seperti daerah Semarang, Bandung, Ambarawa dan lainnya tidak mengetahui bagaimana proses perekrutan di Semarang mulai dari prosesnya, metode yang digunakan seperti apa dan begitu pula sebaliknya, tetapi setiap daerah pendudukan Jepang di Jawa satu sama lain sama-sama mengetahui bahwa setiap daerah pendudukan pasti melakukan perekrutan Jugun Ianfu. Tentara Jepang dalam hal ini, yakni merekrut Jugun Ianfu telah mendapatkan Legal Standing yakni berdasarkan perintah langsung dari Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jenderal Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji.

Jepang pada awal praktek penerapan sistem Jugun Ianfu dilakukan dengan cara legal, dengan membawa wanita penghibur dari Jepang atau Korea. Namun seiring berjalannya waktu dan meluasnya wilayah teritori kekuasaan Jepang pada Perang Dunia ke 2 berubah menjadi eksploitasi dan perbudakan dengan cara-cara ilegal karena kebutuhan wanita penghibur sebelumnya yang dibawa dari Jepang atau Korea tidak mampu mencukupi kebutuhan seksual Tentara Jepang yang telah tersebar dimana-mana dalam kasus penelitian ini yakni di Pulau Jawa. Akhirnya militer Jepang melakukan perekrutan dengan cara lain yakni dengan kekerasan, paksaan, penipuan dan penculikan yang dilakukan pada perempuan-perempuan sipil di wilayah yang diduduki, termasuk Indonesia khususnya Jawa. Terdapat dua tipe Jugun Ianfu yakni Baishi Yunfu (PSK) dan Seiteki Dorei (Budak Seks), untuk tipe Jugun Ianfu yang terdapat di pulau Jawa yakni tipe Seiteki Dorei (Budak Seks) karena perekrutan dilakukan dengan paksa, kekerasan, penipuan dan penculikan.

Berdasarkan data-data yang peneliti temukan untuk proses perekrutan Jugun Ianfu di Jawa, rata-rata korban Jugun Ianfu didapatkan melalui cara-cara paksaan dengan metode Mass Searching dan Small

Scale Searching. Untuk di Jawa, tentara Jepang membuat beberapa tim yang dipimpin oleh Kapten.

Pada awal perekrutan, Jepang menggunakan cara konvensional dengan membuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai pelacur (Baishi Yunfu) daftar persyaratan perempuan yang akan di rekrut umumnya adalah perempuan lajang dan sehat yang berusia 17-35 tahun. Tanggapan atas iklan tersebut awalnya cukup baik, banyak perempuan yang dengan sukarela mendaftarkan diri mereka sendiri dan ada juga perempuan-perempuan yang dijual oleh keluarganya sendiri karena alasan ekonomi. Namun dalam eksekusinya, perekrutan Jugun Ianfu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada saat dilapangan, bahkan anak perempuan yang masih berumur 13 tahun dan belum menstruasi pun tercatat direkrut paksa untuk dijadikan Jugun Ianfu.

Perekrutan Jugun Ianfu di Jawa tidak hanya menasar pada orang-orang pribumi, namun orang Belanda, orang Indo (sebutan untuk keturunan dari hasil pernikahan antara orang Belanda dan pribumi) dan Cina juga menjadi target sasaran untuk dijadikan Jugun Ianfu.

4. SIMPULAN

Jugun Ianfu bukanlah sekedar tuturan dan kisah personal dan sesungguhnya bukan lagi urusan pribadi, tetapi melainkan masalah bangsa Indonesia. Metode yang digunakan Jepang dalam memobilisasi dan menarik tenaga perempuan untuk kebutuhan biologis personel militer serta kalangan elite Jepang, menunjukkan bagaimana sudut pandang Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kesewenangan Jepang dan juga penipuan serta pemerasan yang dilakukan kepada wanita-wanita yang dijadikan Jugun Ianfu hanya meneguhkan kenyataan bahwa Indonesia memang bangsa jajahan yang harus bertekuk lutut pada Jepang (1942-1945). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa proses perekrutan Jugun Ianfu oleh Kempeitai untuk angkatan militer Jepang di Sumatra dan Jawa tahun 1942-1945 adalah sebagai berikut: 1). Didasari oleh pemikiran Kaisar Hirohito yang khawatir akan menurunnya kualitas tentara yang

keletihan akibat kebutuhan biologis, yang diwujudkan dalam instruksinya langsung untuk merekrut Jugun Ianfu. (2). Doktrin militer Gunjin Chokuyu merupakan landasan dari segala aktivitas militer Jepang termasuk dalam perekrutan Jugun Ianfu karena militer Jepang di doktrin untuk patuh dan taat kepada titah kaisar. (3). Hierarki rantai komando tertanam kuat dalam tubuh militer Jepang dalam proses perekrutan Jugun Ianfu. (4). Kempetai sebagai penanggung jawab dalam perekrutan Jugun Ianfu di daerah pendudukan angkatan darat di Sumatra dan Jawa. (5). Perekrutan dilaksanakan melalui cara pemaksaan, penipuan, penculikan serta penggunaan agen/broker. (6). Terdapat pribumi yang dimanfaatkan Jepang dalam upaya memenuhi kebutuhan Jugun Ianfu bagi militer Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Hindra, Koichi Kimura. 2007. *Momoye: Mereka Memanggilku*. Jakarta: Esensi
- F, Amelia. 2020. *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Alprain.
- Hartono, Budi & Juliantoro, Dadang. 1997. *Derita Paksa Perempuan Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013. *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan, Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta. Komnas HAM.
- Kurniawan, Hendra. 2017. *Mengulas yang terbatas, menafsir yang silam*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Lubis, Nina H. 2004. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam

- Oktorino, Nino. 2013. *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oktorino, Nino. 2016. *Dibawah matahari terbit*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Savitri, Dewi. 2010. *Kejahatan Perang Oleh Jepang (Studi Kasus Terhadap Jugun-Ianfu Sebagai Hegemoni Kebudayaan Di Indonesia Periode 1942- 1945)*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III. Hlm: 285.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Usman, Syafarudin. 2009. *Peristiwa Mandor Berdarah*. Jakarta : PT. Buku Kita.
- Yoshimi, Yoshiaki. 1995. *Comfort Women, Sexual Slavery In The Japanese Military During World War II*. New York. Columbia University Press.